

## DAMPAK KEBIJAKAN MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT BIAK NUMFOR

**Patrianus Khristian Sumule**

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

[cristiansumule61@gmail.com](mailto:cristiansumule61@gmail.com)

### **Abstrak**

*Dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Biak Numfor, peranan transportasi darat memiliki posisi penting dan strategic, sehingga kebijakannya perlu dipadukan dalam satu kesatuan kebijakan manajemen transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, untuk meminimalisasi masalah transportasi darat tersebut, namun sebaik apa pun kebijakan tidak akan berhasil secara maksimal selama manajemen transportasi daratnya kurang dibenahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, karena berusaha, menemukan fakta empiric dengan interpretasi yang tepat atas tindakan fenomena yang ada. Hasil penelitian: 1. Pemilihan transportasi darat yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Biak Numfor, dan memperhatikan kebutuhan serta, kepentingan segenap lapisan masyarakat yang berbedabeda, mampu menunjang efektivitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan umum kota. 2. Pembangunan jaringan transportasi darat yang memadai di Kabupaten Biak Numfor telah mampu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat, meningkatnya nilai harga tanah, berkembangnya usaha skala kecil, menengah dan besar, terjadinya spesialisasi produk antar wilayah, terjadinya konsentrasi dan urbanisasi penduduk, terutama di daerah yang telah dibuka akses jalan dan angkutan. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan Kabupaten Biak Numfor dibarengi dengan distribusi barang secara merata antar penduduk, bidang usaha yang tersebar di beberapa wilayah. Di samping itu, terjadi peningkatan jumlah dan jenis barang jadi dan jasa yang mampu dihasilkan para konsumen, pemerintah dan kalangan industri.*

**Kata Kunci:** Kebijakan; Manajemen Transportasi; Perekonomian; Masyarakat

### **PENDAHULUAN**

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, peranan transportasi darat memiliki posisi penting dan strategis, sehingga kebijakan manajemen transportasi darat perlu ditata dalam satu kesatuan kebijakan manajemen transportasi darat dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Efektivitas kebijakan manajemen transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor sangat tergantung bagaimana Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tersebut menangani manajemen

transportasi daratnya, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dengan kebijakan manajemen yang tepat dan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian, maka kondisi transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor diharapkan juga akan mencapai sasaran dengan baik pula.

Kabupaten Biak Numfor sebagai daerah pesisir, saat ini mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang terus meningkat, dan kondisi yang demikian telah berdampak pada sistem transportasi darat

yang ada misalnya; angkutan bus dan angkutan kota. Berbagai kebijakan dikeluarkan, dengan harapan agar masalah transportasi darat tersebut dapat diminimalisasi khususnya masalah jalur/trayek dan terminal. Namun, bagaimana pun kebijakan tersebut dikeluarkan tidak akan berhasil dengan baik, selama manajemen transportasi publiknya tidak atau kurang dibenahi.

Manajemen transportasi darat Kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari ciri peradaban masyarakat yang lebih modern untuk maju dan berkembang, menjadi tampak krusial dan strategis guna dibenahi dan dikelola dengan pendekatan lingkungan, manajemen berbasis partisipasi publik, terintegrasi dengan perencanaan suatu kota atau daerah (Redaksi Jurnal Manajemen Transportasi, 2009). Dengan segala potensi sektor pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Biak Numfor, telah memacu Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasinya guna mengimbangnya. Namun ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan standar kompetensi regional, nasional, hingga internasional, yang mampu mendukung kapasitas stakeholder dalam pembangunan transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor tersebut sangat diperlukan, guna menjamin efektifitas dan keselamatan pada masa operasi serta pemeliharannya.

Sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor tersebut seperti bus dan angkot perlu didukung manajemen yang efektif. Kebijakan manajemen transportasi darat Kabupaten Biak Numfor tersebut, terutama dimaksudkan sebagai sarana yang efektif dan efisien serta sangat penting baik dalam

menunjang keberhasilan dan kelancaran pembangunan bidang transportasi di Kabupaten Biak Numfor maupun dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah. Di samping itu, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga (Zein dan Hanifah, 2008: 185).

Kebijakan manajemen transportasi darat diharapkan dapat menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu saja. Kemajuan pembangunan bidang transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan di Kabupaten Biak Numfor serta mengurangi perbedaan antar wilayah, sehingga mendorong terjadinya pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Dengan adanya manajemen transportasi darat yang modern di Kabupaten Biak Numfor, harapannya dapat menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan yang ada.

Memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata di semua wilayah Kabupaten Biak Numfor. Simbolon (2003: 12) mengemukakan sebagai berikut. "Dalam dunia transportasi ada ungkapan ... ship follow the trade and trade follow the ship", artinya bahwa transportasi (ship) mengikuti perkembangan perdagangan dan perdagangan mengikuti perkembangan transportasi. Dengan demikian, perkembangan suatu masyarakat sangat tergantung kepada perkembangan transportasi dan sebaliknya. Seiring dengan

bertambahnya penduduk di Kabupaten Biak Numfor, maka kebutuhan masyarakat terhadap transportasi akan semakin meningkat pula. Sistem jaringan transportasi darat adalah sangat penting peranannya bagi daerah Kabupaten Biak Numfor yang sedang berkembang pesat, karena secara efektif dan efisien mampu menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonominya.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor, permintaan akan transportasi pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Dari segi kualitas pengguna menuntut alat transportasi yang cepat, aman, murah, nyaman, dengan manajemen (pengelolaan) pelayanan yang baik. Sebaliknya dalam hal kuantitas, dengan makin banyaknya aktivitas masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, maka semakin banyak yang harus dipenuhi terkait alat transportasi yang diperlukan (Zein dan Hanifah, 2008: 185-186). Kebutuhan manajemen transportasi darat secara efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah, teratur dan nyaman merupakan tuntutan dari masyarakat di wilayah ini. Setiap tahap pembangunan di wilayah Kabupaten Biak Numfor, memerlukan manajemen transportasi darat yang efektif dan efisien sehingga perlu adanya suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang dijabarkan dan dilaksanakan secara utuh, terkoordinasi sesuai dengan perkembangan serta perubahan tuntutan pembangunan di massa datang. Manajemen transportasi darat Kabupaten Biak Numfor terdiri dari beberapa komponen yang menjamin suatu fungsi, yaitu memindahkan barang atau

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien, aman, nyaman dan murah.

Kajian efektivitas kebijakan transportasi darat Kabupaten Biak Numfor serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, memiliki dimensi persoalan dengan rentang yang luas dan kompleks serta beragam problematikanya. Oleh karena itu, untuk dapat memahami pola kerja kebijakan tersebut dan aksesibilitasnya, dituntut untuk memiliki pandangan yang luas dan tidak hanya pada satu bidang kajian ilmu saja. Kebijakan pembangunan manajemen transportasi Kabupaten Biak Numfor, bermuara pada terwujudnya kesejahteraan keluarga/ sosial yaitu kemajuan di bidang ketahanan ekonomi masyarakat.

Pembangunan sektor ekonomi masyarakat Kabupaten Biak Numfor juga bertujuan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Apabila terdapat problema dalam kebijakan transportasi Kabupaten Biak Numfor, tentu hal ini akan berdampak luas pada kelancaran lalu lintas dan pada akhirnya akan menghambat dan merugikan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga upaya pencapaian kesejahteraan keluarga di Kabupaten Biak Numfor juga terhambat. Dalam sektor bisnis dan perekonomian contohnya, banyak pengusaha dan masyarakat luas yang mengeluhkan jalur-jalur perekonomian dan bisnis yang selalu dihantui dengan ketersediaan sarana angkutan sehingga mau tidak mau juga menambah biaya pengeluaran perusahaan dan aktivitas kerja mereka. Sebagai warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor, sedikit sekali waktu yang dapat disediakan untuk

kegiatan sosial dan personal lainnya. Di sisi lain, akibat tidak berfungsinya dengan terminal yang ada akan membengkakkan biaya perjalanan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan berbagai ketentuan atau serangkaian kebijakan guna mencari solusi atas kondisi tersebut, namun tetap saja belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Untuk itu, diperlukan kehadiran kebijakan manajemen transportasi darat (angkutan umum dan pergerakan angkutan barang/kontainer) secara terpadu di wilayah Kabupaten Biak Numfor yang pengembangannya dilakukan secara terencana sesuai dengan besaran kota, fungsi kota dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, lingkungan dan tata. ruang. Selanjutnya, pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana mendukung, maka tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu daerah. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor, bahwa secara umum transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan daerah, mengembangkan industri lokal dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat.

Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis misalnya untuk mempertinggi integritas daerah. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Kabupaten

Biak Numfor, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat atau pengangkutan mutlak diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, menjadikan bahasan tentang kebijakan manajemen transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat setempat, adalah sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk dikaji lebih dalam. Kajian tersebut adalah dalam bentuk penelitian dengan judul " Dampak Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor".

Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis tentang dampak kebijakan manajemen transportasi darat terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena berusaha menemukan fakta tentang dampak kebijakan manajemen transportasi darat terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, dengan interpretasi yang tepat dan menggambarkan secara akurat sifat dan tindakan dari fenomena kelompok maupun individu pada tataran empirik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena mengamati dan menangkap realitas dan mengkaji perilaku individu dan kelompok serta pengalaman informan sehari-hari.

Untuk menganalisa data dalam pembahasan digunakan metode instruspeksi, retrospeksi, menggambarkan sebagaimana adanya, mengalami dan menemukan verstehen, uniqueness sedalam-dalamnya, meneliti suatu gejala, mengamati kausalitas empirik, membentuk teori dan data. Melalui teknik triangulasi, peneliti melakukan

crosscheck data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya serta, membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Keseluruhan data ini, diperoleh baik dalam bentuk data primer man pun data sekunder. Sumber data utama penelitian dengan menggunakan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, maupun dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aspek Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Kabupaten Biak Numfor**

Dari hasil wawancara dengan para Informan menunjukkan, bahwa transportasi atau pengangkutan di Kabupaten Biak Numfor merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor antara, lain dalam rangka memenuhi kebutuhan kelancaran pengangkutan, kenyamanan, dan keamanan serta menunjang pelaksanaan pembangunan. Di bidang pembangunan di antaranya adalah penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok Kabupaten Biak Numfor, misalnya sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan,

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Surya (2006) bahwa kebijakan penyediaan moda angkutan darat beberapa kota di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan populis. Pendekatan ini mengacu kepada kemampuan moda angkutan darat untuk mengangkut sebanyak mungkin penumpang yang bermukim di pinggiran dan pusat kota. Untuk kategori Indonesia sebagai negara berkembang di

Asia, kebijakan populis dalam penyediaan moda angkutan darat dinilai lebih populer daripada pendekatan moda angkutan darat yang mementingkan kenyamanan dengan tingkat keselamatan tinggi. Pasalnya, populasi kota terus bertambah, sehingga keterbatasan moda angkutan darat justru akan memicu terjadinya konflik sosial dengan segala akibat yang mungkin timbul kemudian hari.

Ditegaskan bahwa pembangunan dinilai baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarannya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi darat sendiri. Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi juga harus dapat membenikan, kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi darat terutama pengguna jasa transportasi. Mengingat penting dan strategisnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi darat perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor man pun penyedia jasa transportasi darat. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi darat juga harus mendapatkan kepastian.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Biak Numfor, juga telah diupayakan pelaksanaannya secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian

lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi darat di daerah yang handal dan terpadu. Tentu saja implementasi kebijakan sistem transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor, juga memiliki permasalahan yang sama halnya dengan sistem transportasi perkotaan daerah-daerah lainnya.

Angkutan kota dan bus di Kabupaten Biak Numfor dipengaruhi oleh jalur/trayek dan terminal. Adanya pemukiman baru sebagai akibat perubahan struktur masyarakat membutuhkan angkutan sebagai faktor ikutan kebutuhan masyarakat, namun pemerintah Kabupaten Biak Numfor kurang tanggap mengatasi masalah. Masyarakat yang ada pada pemukiman baru harus membuang waktunya dengan jalan kaki ke jalan yang menjadi jalur/trayek angkutan umum. Permasalahan lain adalah terkait dengan terminal, dimana Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal mengharuskan setiap angkutan umum untuk masuk terminal. Permasalahannya adalah terminal milik Pemerintah Daerah kabupaten Biak yang ada berlokasi di luar kota yaitu kurang lebih 3 (tiga) kilometer ke arah utara, sementara jalur/trayek untuk angkutan umum terdiri dari 3 (tiga) jalur utama yaitu Jalur Biak Utara, Jalur Biak Barat dan Jalur Biak Timur. Masalah utama ada pada Jalur Biak Barat dan Jalur Biak Timur, dimana angkutan umum pada kedua jalur ini berakut di kota. Untuk sampai ke terminal masyarakat harus ganti angkutan. Permasalahan lain yang muncul adalah angkutan umum dari kedua jalur Biak Barat dan jalur Biak Timur ngetem/parkir di sembarang jalan dalam kota. Akibat dari masalah ini, kenyamanan, ketertiban dan keamanan berlalu lintas di Kabupaten Biak

Numfor semakin sulit dapat diwujudkan

Permasalahan ini berkaitan erat dengan pola tata guna lahan, karena sektor ini sangat berperan dalam menentukan kegiatan dan aktivitas pergerakan yang terjadi. Apabila tidak segera ditangani dengan suatu kebijakan sistem transportasi darat dan solusi yang tepat, akan dapat memperbesar dampak dan permasalahan yang ditimbulkan serta pemborosan penggunaan energi yang sia-sia. Untuk memberikan alternatif pemecahan yang tepat, maka diperlukan suatu sistem pendekatan yang tepat pula yang mencakup seluruh aspek yang terkait. Suatu kecenderungan terjadi karena berkembangnya suatu kota bersamaan pula dengan berkembangnya masalah transportasi darat yang terjadi, sehingga jika tidak ada sinergi yang perkotaan secara terus-menerus.

Permasalahan yang ada bukan saja menyangkut pada kenyamanan sistem transportasi darat yang terganggu (keterlambatan, parkir dll.), namun juga mengakibatkan turunnya penerimaan daerah dari pos Retribusi Terminal. Jadi dapat dilihat, bahwa permasalahan transportasi darat ini merupakan suatu permasalahan kompleks yang melibatkan banyak aspek, pihak dan sistem yang terkait sehingga dalam pemecahan permasalahan tersebut memerlukan suatu pemecahan yang comprehensive dan terpadu yang melibatkan- semua unsur (elemen) dan aktor dalam pembangunan suatu kota.

Hasil triangulasi dapat dikemukakan bahwa seiring dengan perubahan iklim (climate change) transportasi berkelanjutan, menjadi sesuatu hal yang wajib dipatuhi dalam setiap perencanaan sistem transportasi darat. Sistem transportasi berkelanjutan (sustainable transportation)

menjadi sebuah jawaban dari tantangan yang dihadapi planner dan menjadi trend dewasa ini, perkembangan kota biasanya dibarengi dengan masalah jalur/trayek angkutan umum. Strategi apa yang harus ditempuh untuk mengatasi hal tersebut harus cepat dan tepat dengan kesepakatan antara penyedia jasa angkutan dan pemerintah. Ada 3 (tiga) pilar menyokong keseimbangan sistem lalu lintas di kabupaten Biak Numfor yaitu; perencanaan guna lahan, pembatasan lalu lintas kontainer/angkutan barang dan pengembangan transportasi umum.

Dengan lebih terkonsentrasi, penyediaan angkutan umum bisa lebih baik dan efisien, sehingga orang akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan cenderung menggunakan angkutan umum, bersepeda atau berjalan kaki. Sebaliknya budaya suburban dengan gagasan urban sprawl menganggap bahwa kemacetan disebabkan karena terlalu banyaknya kendaraan di wilayah yang sempit, dan pada gilirannya kemacetan memperparah polusi. Oleh karena itu, kota harus dibiarkan berkembang menyebar, untuk menyebar lalu-lintas dan tidak terfokus pada satu kota saja. Ada tiga pilar yang menyokong keseimbangan sistem lalu-lintas di wilayah Kabupaten Biak Numfor, yaitu perencanaan guna lahan, pembatasan lalu-lintas kontainer/angkutan barang, dan pengembangan transportasi umum.

Ketiga pilar ini harus seimbang, karena hanya dengan kombinasi yang seimbang sistem dapat berhasil. Dari ke tiga pilar tersebut, yang pertama, perencanaan guna lahan, khususnya yang menyangkut kebijakan kepadatan kota (urban density). Kebijakan tentang kepadatan kota bukan merupakan kebijakan transportasi darat, tetapi kebijakan ini mempunyai dampak,

langsung dan taklangsung, terhadap sistem transportasi kota. Masalahnya menjadi menarik bukan semata-mata karena hubungannya dengan sistem transportasi darat saja, tetapi lebih karena dampaknya terhadap sistem pembangunan berkelanjutan secara umum.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa seluruh kebijakan terkait perencanaan sistem transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor, telah mengarah pada suatu kebijakan yang menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait sebagai pemimpin suatu wilayah dan memberikan perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan tatanan moda transportasi darat yang telah ada sebelumnya. Sekali pun kebijakan tersebut mengarah pada suatu perubahan yang positif, tanpa adanya sanksi yang tegas dan riil tidak akan memberikan perubahan yang berarti untuk menjawab segala permasalahan yang ada dan menjadi momok yang terus membayangi sistem transportasi yang ada. Kebijakan transportasi darat haruslah didasari oleh visi sistem lalu lintas dan angkutan umum berkelanjutan. Sistem transportasi haruslah berjalan baik sepanjang waktu.

Pengertian berjalan baik adalah proses perpindahan berjalan lancar, aman, nyaman dan juga harus efisien. Dengan kata lain, permintaan akan kebutuhan transportasi darat harus diimbangi dengan penyediaan prasarana transportasi darat secara proposional. Sistem transportasi berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna jalan dengan aman dan nyaman; memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi

maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Biak Numfor tersebut, maka dibutuhkan peningkatan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai, yang antara lain adalah kebutuhan transportasi perkotaan. Sistem transportasi di Kabupaten Biak Numfor mempunyai peran penting dalam mengarahkan perkembangan kota dan merupakan salah satu pembentuk struktur kota. Oleh karenanya kebijakan penyediaan sistem transportasi Kabupaten Biak Numfor haruslah terkait dengan tata guna lahan kota. Selain itu, sistem transportasi juga merupakan penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor. Perekonomian Kabupaten Biak Numfor akan dapat lebih berkembang dengan baik bila kota didukung oleh sistem transportasi darat yang efisien. Sistem transportasi yang tidak efisien akan menimbulkan biaya tambahan sebagai akibat penempatan lokasi terminal, keterkaitan antar moda yang tidak saling mendukung, kurangnya angkutan umum yang memadai khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah, dan sebagainya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pengembangan Kabupaten Biak Numfor yang lebih memihak kepada pengguna mobil pribadi, sedangkan pejalan kaki dianggap sebagai warga negara kelas dua, terlebih lagi pars diffable, insan lansia, perempuan, dan anak-anak. Dengan konsep demikian, maka dampaknya adalah Kabupaten Biak Numfor memerlukan jaringan jalan dan fasilitas parkir dalam jumlah banyak, sementara kepentingan angkutan umum tampak kurang diperhatikan dan dikembangkan. Kesemua

hal tersebut pada gilirannya menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan lalu-lintas, ketidakefisienan pergerakan, pemborosan energi, dan sebagainya.

Kebijakan manajemen transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor, telah diarahkan pada upaya pembangunan berkelanjutan serta menjawab mengenai pemanasan global yang akhir-akhir ini kian dirasakan khususnya di Kabupaten Biak Numfor, dan dengan kebijakan tersebut, maka hal ini telah menjadi pertimbangan untuk mencari alternatif dalam menertibkan penggunaan sumber-sumber penyebab pemanasan global tersebut. Sektor transportasi darat sebagai salah satu kontributor utama terhadap pemanasan global, akibat tingginya penggunaan kendaraan bermotor, berdampak pada pemborosan bahan bakar dan polusi udara yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan. Tantangan mengenai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) memerlukan reformasi kebijakan dalam sektor transportasi darat, guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang lebih baik dan berkelanjutan.

Peningkatan mobilitas melalui penyediaan prasarana jalan telah menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor, namun di sisi lain akan mempengaruhi lingkungan, pengadaan jasa transportasi yang efisien dalam kerangka yang kompetitif. Sarana angkutan umum murah yang disediakan oleh sektor informal bisa memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kabupaten Biak Numfor berpenghasilan rendah, namun bila tidak dibina dengan baik bisa merusak lingkungan dan menyebabkan kemacetan akibat ketidakteraturannya. Kondisi di atas menggambarkan bahwa ada trade-off' yang

harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mengambil kebijakan transportasi darat.

Selanjutnya, pengambilan keputusan investasi di sektor transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang selalu dihadapkan kepada dua hal yaitu investasi penyediaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum. Investasi dalam penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum lebih potensial dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor dalam hal penyediaan lapangan kerja dan mempunyai karakteristik pendukung yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dibandingkan investasi prasarana dan sarana jaringan jalan. Investasi dalam penyediaan angkutan umum, juga didukung oleh mekanisme subsidi yang benar-benar mengenai pada kelompok yang akan disubsidi dan pola kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dengan semakin majunya pembangunan sistem transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor, maka hal ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, secara umum transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan daerah, mengembangkan industri lokal dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis misalnya untuk mempertinggi integritas daerah. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya

transportasi di Kabupaten Biak Numfor, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat atau pengangkutan mutlak diperlukan.

Ke depan, hal-hal tersebut di atas harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan dalam penginvestasian pengembangan sektor transportasi darat yang seimbang antara pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan dan angkutan umum sesuai dengan karakteristik Kabupaten Biak Numfor sendiri. Kabupaten Biak Numfor telah memberikan pelayanan angkutan umum dengan lebih dari satu moda sesuai karakteristik kota. Oleh karena itu, dalam mengadakan perencanaan pengembangan sistem angkutan umum telah dilakukan secara terpadu antara berbagai subsistem (moda) tersebut, sehingga tidak teradi tumpang tindih antara moda satu dengan yang lainnya. Namun dengan berbaurnya berbagai moda di Kabupaten Biak Numfor yang kurang memperhatikan hirarki dan fungsi jaringan jalan, maka telah menimbulkan persaingan yang kurang sehat dalam pengoperasiannya.

Pemilihan moda yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Biak Numfor, dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan segenap lapisan masyarakat yang berbeda-beda, juga mampu menunjang efektivitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan umum kota. Untuk membangun dan mengembangkan sistem transportasi, perlu perencanaan sistem transportasi yang dirancang sedemikian rupa dan prosedur pengelolaan. Dalam sistem transportasi dipengaruhi oleh prasarana, sarana, dan pengelolaan. Prasarana pada sistem transportasi adalah sesuatu yang dapat menjadi media pergerakan, seperti jalan raya, terminal, yang terkoneksi dengan daerah/kota lainnya mau pun dengan

pelabuhan laut, dan pelabuhan udara yang keberadaannya di Provinsi Papua belum dalam kondisi yang prima untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah. Sedangkan sarana tersebut adalah sesuatu yang berwujud kendaraan, yang berfungsi memindahkan sesuatu atau orang dari satu tempat ke tempat lain pada suatu wilayah atau antarswilayah yang keberadaannya sangat tergantung pada prasarana yang ada.

### **Aspek Dampak Kebijakan Transportasi Darat Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Biak Numfor**

Hasil wawancara, mendalam dengan para informan dapat dijelaskan bahwa transportasi merupakan suatu unsur yang sangat penting bahkan dapat berfungsi sebagai urat nadi bagi kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, politik, dan sosial budaya serta mobilitas penduduk yang mampu tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika yang terjadi. Di antara dampak perkembangan sektor transportasi di Kabupaten Biak Numfor tersebut, yang paling nyata adalah terkait dinamika perekonomian masyarakat. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan di antara dampak ekonomi atas pembangunan di bidang transportasi ini adalah berkembangnya usaha masyarakat dalam Skala kecil; di tengah masyarakat semakin tersedianya barang-barang kebutuhan hidup; bertambah tingginya harga tanah; maraknya urbanisasi; harga barang produksi semakin menurun; terjadinya stabilisasi dan penyesuaian harga barang; dan semakin tumbuhnya usaha-usaha dalam skala menengah dan besar.

Dari hasil triangulasi menunjukkan bahwa dengan kemajuan di bidang transportasi darat di Kabupaten Biak

Numfor tersebut adalah terjadinya perkembangan usaha masyarakat dalam skala kecil. Perekonomian dalam skala kecil oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor semakin tumbuh merata di seluruh wilayah, dan pada umumnya pertumbuhan ekonomi skala kecil tersebut adalah seiring dengan pertumbuhan ekonomi dalam skala besar. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi skala besar pada umumnya memerlukan sumber produksi bahan mentah yang tentu berasal dari daerah untuk diolah lebih lanjut pada pabrik/perusahaan dalam skala menengah dan besar. Dengan demikian, terbangunlah mitra bisnis yang saling menguntungkan ke dua belah pihak dan bukan sebaliknya yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat atau bahkan saling berusaha mematikan satu dengan yang lain.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara ekonomis dapat ditunjukkan bahwa pabrik atau perusahaan yang besar dengan penggunaan teknologi modern, maka akan berhemat penggunaan tenaga kerja dan tentu memiliki spesifikasi kerja yang tinggi pula. Dengan kemudahan, kenyamanan, dan ongkos angkut yang terjangkau masyarakat kelas menengah dan bawah serta berbagai fasilitas transportasi yang tersedia lainnya di Kabupaten Biak Numfor, maka hal ini akan memudahkan suplai bahan-bahan dan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan/pabrik besar, sehingga mampu memproduksi yang lebih besar dan mampu memasarkan hasil/produk pada pasar yang lebih luas.

Selanjutnya, dari hasil wawancara kepada para informan dapat ditunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi dari kebijakan manajemen transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor tersebut telah mampu meningkatkan terjadinya aktivitas perpindahan manusia terutama dari daerah-

daerah perkampungan/pinggiran ke daerah perkotaan. Dengan kata lain, telah terjadi konsentrasi penduduk dari daerah-daerah pinggiran ke daerah perkotaan di Kabupaten Biak Numfor.

Dari hasil observasi dapat ditunjukkan bahwa dengan tersedianya moda transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor misal angkutan kota (angkot), bus, dll yang murah dan nyaman, maka hal tersebut akan mendorong timbulnya pekerjaan yang lebih terspesialisasi antar daerah. Tentu saja hal ini mampu mendorong berkembang pusat-pusat konsentrasi pertumbuhan industri rumah tangga mau pun perdagangan pada skala besar. Jadi, peningkatan usaha perekonomian di masyarakat akan mendorong pertumbuhan serta terpusatnya pertumbuhan baru dalam skala yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berimbas pada berbagai aktivitas yang menyertainya misalnya storing, processing, packaging, advertising, financing dan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang terkait serta ditunjang dengan berbagai fasilitas moda transportasi yang ada.

Hasil observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa di Kabupaten Biak Numfor telah terjadi pertumbuhan pusat-pusat kota baru, dan daerah-daerah pemukiman baru sebagai pusat kota baru (urban centre). Sehingga telah berkembang secara merata kota-kota dalam skala besar dengan berbagai sarana dan prasarannya, tetapi juga dengan kedatangan para urbanisasi penduduk dari desa ke kota untuk mengadu nasib mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya, dijelaskan hasil wawancara dengan para Informan yang mengemukakan bahwa dampak perekonomian atas kebijakan transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor bahwa telah terjadi peningkatan

nilai tambah. Misalnya, banyak lahan pertanian atau lahan yang tidak produktif (inprofitable) untuk dikelola bagi usaha pertanian sehingga hasilnya pun juga tidak dapat dijual ke pasar karena lokasinya yang jauh serta ongkos transportasinya mahal.

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa dengan tersedianya transportasi yang mudah, murah, aman, dan nyaman ke desa-desa/kampung atau wilayah yang potensial untuk pengembangan pertanian, maka dihasilkan produksi pertanian yang hasilnya dapat diangkut dan dijual ke pasar dengan harga yang lebih menguntungkan. Jadi, nilai tanah yang sebelumnya jauh dan terpencil dari pasar, maka akan naik nilainya dibanding sebelumnya. Efek nyata dari adanya transportasi yang baik dan lancar tersebut adalah tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat tertentu yang tidak dihasilkan oleh suatu daerah dan mudah ditemukan di daerah lain. Misalnya, karena kondisi keterbatasan sumber daya alam yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan atau kalau tetap dipaksakan untuk ditanam di daerah tertentu, maka dibutuhkan biaya yang lebih tinggi.

Dengan adanya transportasi yang mudah, murah, dan lancar tersebut maka pada masyarakat tertentu yang tidak mampu menghasilkan barang tertentu sehingga kekurangan atas ketersediaan barang tersebut dapat dikirim barang dari daerah lain dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di samping itu, akan terjadi penurunan ongkos pengangkutan dari produsen ke konsumen. Juga terbuka kemungkinan adanya pembagian kerja secara geografis di antara daerah-daerah atau terjadi spesialisasi secara teritorial yang mampu menghasilkan efisiensi dan lain-lain. Dengan tersedianya transportasi darat yang mudah, ramah, dan lancar tersebut, hal ini

memungkinkan pula lebih banyaknya penjual atau pengusaha yang dapat masuk ke pasar. Hal ini akan memperbesar persaingan di antara mereka yang dapat mengakibatkan penurunan harga.

## **SIMPULAN**

Kebijakan manajemen transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor telah mengarah pada upaya pembangunan berkelanjutan serta menjawab penyebab terjadinya ngetem/parkir angkutan kota disembarang tempat yang sangat mengganggu pengguna jalan dalam berlalu lintas. Dengan kebijakan tersebut, maka hal ini menjadi pertimbangan untuk mencari alternatif dalam menertibkan angkutan kota penyebab masalah. Tantangan mengenai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) memerlukan reformasi kebijakan dalam sektor transportasi darat, guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang lebih baik dan berkelanjutan.

Peningkatan mobilitas melalui penyediaan prasarana jalan telah menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor, namun di sisi lain akan mempengaruhi lingkungan, pengadaan jasa transportasi yang efisien dalam kerangka yang kompetitif. Sarana angkutan umum murah yang disediakan oleh sektor informal bisa memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kabupaten Biak Numfor berpenghasilan rendah, namun bila tidak dibina dengan baik bisa merusak lingkungan dan menyebabkan terganggunya lalu lintas akibat ketidakteraturannya. Kondisi di atas menggambarkan bahwa ada 'trade-off' yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mengambil kebijakan transportasi darat.

Pengambilan keputusan investasi di

sektor transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang selalu dihadapkan kepada dua hal yaitu investasi penyediaan prasarana jaringan jalan dan penyediaan prasarana dan sarana, angkutan umum. Investasi dalam penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum lebih potensial dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor dalam hal penyediaan lapangan kerja dan mempunyai karakteristik pendukung yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dibandingkan, investasi prasarana dan sarana jaringan jalan.

Kabupaten Biak Numfor telah memberikan pelayanan angkutan umum dengan lebih dari satu moda sesuai karakteristik kota. Oleh karena itu, dalam mengadakan perencanaan pengembangan sistem angkutan umum telah dilakukan secara terpadu antara berbagai sub-sistem (moda) tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara moda satu dengan yang lainnya. Namun dengan berbaurnya berbagai moda di Kabupaten Biak Numfor yang kurang memperhatikan hirarki dan fungsi jaringan jalan, maka telah menimbulkan persaingan yang kurang sehat dalam pengoperasiannya. Pemilihan moda yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Biak Numfor, dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan segenap lapisan masyarakat yang berbedabeda, juga mampu menunjang efektivitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan umum kota.

Pembangunan jaringan transportasi darat yang memadai di Kabupaten Biak Numfor adalah mampu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat, meningkatnya nilai tanah, berkembangnya usaha skala kecil, tedadinya spesialisasi produk antar wilayah, terjadinya konsentrasi

dan urbanisasi penduduk, terutama di kampung-kampung yang telah dibuka akses jalan dan angkutan. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan daerah dibarengi dengan distribusi barang secara merata antar penduduk, bidang usaha yang tersebar di beberapa kampung. Di samping itu, terjadi peningkatan jumlah dan jenis barang jadi dan jasa yang mampu dihasilkan para konsumen, pemerintah dan kalangan industri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. 2006. *Transportasi Public dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Azas-azas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 22. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Adi Lanugranto. 2008. *Konsumen dan jasa transportasi*. S u r a k a r t a : Universitas Muhammadiyah.
- Salim, H.A. Abbas, 1993, *Manajemen Trasportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [UUD] Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jakarta: UUD,
- [UU] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- Info HUBDAT, Edisi Maret 2010, Humas Dirjen Perhubungan Darat, Jakarta.